

**KINERJA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM
MELAKSANAKAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA
PERIODE 2019 – 2024**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

OLEH:

DIMAS AUDIANSYAH

1910842026



DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

ABSTRAK

Dimas Audiansyah, NIM 1910842026, Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam Melaksanakan Fungsi Pembentukan Perda Periode 2019-2024, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang 2026. Dibimbing oleh Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA. Skripsi ini terdiri dari 105 halaman dengan referensi 7 buku teori, 9 jurnal, 2 skripsi, dan 2 website internet.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda. Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembentukan perda belum maksimal terutama dalam hal kuantitas, masih banyak ranperda yang tidak berhasil disahkan menjadi perda. Selain itu, koordinasi yang tidak optimal antara DPRD dan sektor terkait dalam pembentukan perda.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penetapan informan dilakukan menggunakan Teknik *purposive sampling*, sedangkan untuk menguji keabsahan data peneliti dilakukan melalui triangulasi sumber. Peneliti menggunakan teori kinerja menurut Robbins yang terdiri dari 4 variabel yaitu Kualitas, Kuantitas, Ketepatan Waktu, dan Efektivitas.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara keseluruhan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam Melaksanakan Fungsi Pembentukan Perda pada Periode 2019-2024 sudah baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya optimal pada variabel kualitas, proses recruitment masih kurang kompleks hanya fokus pada seleksi administratif. Pada variabel kuantitas, jumlah perda yang berhasil ditetapkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan ranperda yang telah dirumuskan. Pada variabel efektivitas, masih terdapat kekurangan dalam aspek kenyamanan dan kebersihan sarana prasarana serta pemanfaatan prasarana teknologi masih minim sehingga mempengaruhi efektivitas proses pembentukan perda. Saran peneliti bagi DPRD Provinsi Sumatera Barat, untuk meningkatkan kinerja dalam fungsi pembentukan perda perlu diadakan proses recruitment yang spesifik sehingga anggota DPRD yang diterima memiliki kompetensi yang relevan. Selain itu, internal DPRD perlu meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam memaksimalkan penetapan ranperda menjadi perda. Berikutnya, untuk pengadaan sarana dan prasarana sangat penting diperhatikan untuk menunjang kinerja dan memberi kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung.

Kata Kunci: Kinerja, DPRD Provinsi Sumatera Barat, Perda

ABSTRACT

Dimas Audiansyah, NIM 1910842026, Student ID Number 1910842026, The Performance of the West Sumatra Provincial DPRD in Implementing the Function of Forming Regional Regulations for the 2019-2024 Period, Departement of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang 2026. Supervised by Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP,M.PA dan this thesis consists of 105 pages with references from 7 theoretical books, 9 journals, 2 theses, and 2 internet websites.

The study aims to describe the performance of the West Sumatra Provincial DPRD in implementing the function of forming regional regulations. The formation of regional regulations (perda) is a manifestation of the authority granted to regional governments in the context of implementing regional autonomy and assistance tasks, as well as accommodating special regional conditions an/or further elaboration of higher-level laws and regulations. This research is motivated by the fact that the formation or regional regulations has not been maximized, especially in terms of quantity. Many draft regulations have not been successfully ratified into regulations. Furthermore, there is suboptimal coordination between the Regional Legislative Council (DPRD) and related sectors in the formulation or regional regulations.

The study employed qualitative methods with a descriptive approach. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. Informants were selected using *purposive sampling*, while data validity was tested through source triangulation. The researchers employed Robbins performance theory, which consists of four variables is Quality, Quantity, Timeliness, and Effectiveness.

The study concluded that the overall performance of the West Sumatra Provincial DPRD in carrying out its regulation-making function during the 2019-2024 period was good. However, several factors contributes to the suboptimal performance of the Sumatra Provincial DPRD, including the less tha optimal quality of the recruitment process, which focused solely on administrative selection. Regarding the quantity variable, the number of successfully enacted regional regulations was significantly lower than the number of draft regulations that had been formulated. Regarding of the effectiveness variable, there still shortcomings in the comfort and cleanliness of infrastructure, and the minimal use of technological infrastructure, which impacted the effectiveness of the regional regulation making process. The researcher's recommendation for the West Sumatra Provincial DPRD is to improve its performance in the regulation-making function by implementing a specific recruitment process so that the members recruited have relevant competencies. Furthermore, the DPRD needs to improve coordination with relevant cross-sectoral stakeholders to maximize the adoption of draft regulations into regulations. Furthermore, the procurement of facilities and infrastructure is crucial to support performance and provide comfort for visiting residents.

Keywords: Performance, DPRD of West Sumatra Province, Regional Regulation